



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKAMTO**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN POLITIK**
3. NHK : **429845**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.802.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 547.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
3. Tanah Seluas 1989 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/40 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **283.600.000**

1. MOTOR, SUZUKI SPIN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.800.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. LAINNYA, PINARELLO F12 F 12 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. LAINNYA, SPECIALIZED S-WORK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. LAINNYA, MONDRAKER - Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



7. LAINNYA, ORION SEPEDA LIPAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
8. LAINNYA, MODIFIKASI SEPEDA MODIFIKASI Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000
9. LAINNYA, MINIVELO SEPEDA MINIVELO Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	32.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	58.005.942
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.176.605.942
III. HUTANG	Rp.	145.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.031.605.942

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.